



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 82 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perberdahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
20. Pasal 2 ayat (2) huruf g, Pasal 22E, dan Pasal 22F Peraturan Daerah Kabupaten garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2016
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 82 TAHUN 2016**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau, Prima Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis.					
1.	meningkatkan akses dan tingkat pendidikan masyarakat	a. angka melanjutkan ke SMA/SMK	SMP	(jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100%	Dinas Pendidikan
		b. angka melek huruf	%	(jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%	Dinas Pendidikan
		c. rata-rata lama sekolah	tahun	<p>kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan, indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.</p> <p>angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.</p>	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6
2.	meningkatkan akses dan derajat kesehatan masyarakat	a. cakupan pelayanan rawat jalan	orang	jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang terlayani dalam satu tahun	RSUD dr. Slamet
		b. cakupan pelayanan rawat inap	orang	jumlah kunjungan pasien rawat inap yang terlayani dalam satu tahun	RSUD dr. Slamet
		c. cakupan linakes	%	(jumlah ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga medis dibagi Jumlah seluruh ibu melahirkan) x 100%	Dinas Kesehatan
		d. jumlah kasus kematian ibu melahirkan	orang	kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.	Dinas Kesehatan
3.	terkendalinya pertumbuhan penduduk	e. jumlah kasus kematian bayi	orang	kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun	Dinas Kesehatan
		f. cakupan desa siaga aktif	%	(jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah desa) x 100%	Dinas Kesehatan
		a. menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	%	rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	((jumlah penduduk tahun perhitungan dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6
4.	meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	%	(jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. prosentase <i>trafficking</i> yang tertangani	%	(jumlah <i>trafficking</i> yang tertangani dibagi jumlah kasus <i>trafficking</i>) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu (orang)	orang	jumlah fakir miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan	Dinas Sosial
		b. jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang dibantu	keluarga	jumlah keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah	Dinas Sosial
6.	meningkatkan kesempatan kerja, perlindungan dan kesejahteraan pekerja	a. prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	(jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		b. prosentase kesesuaian Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	%	jumlah nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) x 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		c. prosentase Jamsostek keikutsertaan	%	(jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah penduduk bekerja) x 100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal					
1.	meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian	a. produksi produk olahan hasil hortikultura	ton	jumlah produk olahan hasil hortikultura dalam setahun	Dinas Pertanian
		b. produksi produk olahan hasil perkebunan	ton	jumlah produk olahan hasil perkebunan dalam setahun	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6
2.	meningkatkan pendapatan keluarga petani hortikultura dan perkebunan	prosentase penurunan petani miskin	%	jumlah prosentase penurunan petani miskin dalam setahun	Dinas Pertanian
3.	meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan	a. jumlah produksi perikanan budidaya tambak (ton) b. jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang (ton)	ton ton	jumlah produksi perikanan budidaya tambak dalam satu tahun jumlah produksi perikanan budidaya kolam air tenang dalam satu tahun	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
4.	berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	a. jumlah kunjungan wisata (juta orang)	juta orang	jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata dalam satu tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5.	meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, UMKM, industri, perdagangan, dan nilai investasi daerah dalam mendorong perekonomian Daerah	a. jumlah wirausahawan baru b. prosentase Koperasi aktif/sehat c. prosentase peningkatan realisasi investasi daerah	orang % %	jumlah wirausahawan baru dalam satu tahun (jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu (jumlah realisasi investasi tahun perhitungan dikurangi jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya) dibagi jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya x 100%	Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

MISI 3 : Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman

1.	meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai	prosentase jalan Kabupaten mantap (baik dan sedang)	%	(panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan Kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	meningkatkan kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman	a. menurunnya jumlah rumah tidak layak huni b. cakupan rumah tinggal bersanitasi c. prosentase cakupan air minum perkotaan	unit % %	jumlah rumah tidak layak huni dalam satu tahun tertentu (jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah tinggal) x 100% (jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan) x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6
		d. prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	(jumlah penduduk pengguna air bersih di perdesaan dibagi jumlah penduduk perdesaan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	(luas wilayah yang sesuai tata ruang dibagi luas wilayah) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	a. tingkat kemandapan jaringan irigasi teknis Kabupaten b. tingkat kemandapan jaringan irigasi Desa	% %	persentase jaringan irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi mantap persentase jaringan irigasi Desa dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. indeks kualitas lingkungan hidup	poin	mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan dengan rumus IKLH = $(IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Catatan: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		b. tingkat pelayanan sampah (%)	%	tingkat pelayanan sampah (<i>Level of Service</i>) = $(\text{daya angkut sampah dibagi volume timbulan sampah wilayah pelayanan} \times 100\%)$	Dinas Lingkungan Hidup
6.	meningkatkan antisipasi dan penanganan dini kebakaran yang di lakukan masyarakat	persentase kebakaran yang dapat ditanggulangi dini oleh masyarakat	%	jumlah kejadian kebakaran yang dapat ditangani oleh masyarakat/jumlah kejadian kebakaran keseluruhan	Dinas Kebakaran Pemadam
7.	tercapainya <i>e-government</i> sebagai wujud pelayanan prima	prosentase pengintegrasian sistem aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	jumlah sistem aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah terintegrasi/jumlah seluruh aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5	6
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.					
1.	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	a. predikat Kabupaten SAKIP b. predikat penilaian LPPD Kabupaten c. opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah d. prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	predikat SAKIP predikat LPPD opini BPK %	predikat penilaian SAKIP Kabupaten predikat penilaian LPPD Kabupaten Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam satu tahun	Inspektorat/Bappeda/ Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
2.	meningkatnya sumber daya manusia aparatur yang profesional, disiplin dan berwibawa	a. prosentase penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai b. prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 75% c. tingkat pelanggaran disiplin pegawai	% %	(jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan) x 100% (jumlah pegawai yang mencapai SKP diatas 75% dibagi total jumlah pegawai) x 100% (jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai dibagi jumlah pegawai) x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat
3.	meningkatnya kehidupan berdemokrasi	prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya dibagi jumlah penduduk yang memiliki hak pilih x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 - 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
1	2	3	4	5	6
DINAS PENDIDIKAN					
1.	meningkatkan pemerataan akses pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	a. angka partisipasi kasar PAUD b. angka partisipasi murni SD c. angka partisipasi murni SMP	% %	$\frac{\text{jumlah siswa}}{\text{jumlah penduduk usia 2-6 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah siswa usia 13-15 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas Bidang Sekolah Dasar Bidang Sekolah Menengah Pertama
2.	meningkatkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang menuntaskan pendidikannya hingga setara SMA	penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA	%	$\frac{\text{jumlah lulusan pendidikan kesetaraan paket C tahun berjalan}}{\text{jumlah penduduk belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA Usia 25 tahun ke atas}} \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas
3.	meningkatkan mutu pendidikan	a. persentase PAUD terakreditasi minimal B b. rata-rata nilai ujian SD c. rata-rata nilai ujian SMP	% Angka Angka	$\frac{\text{jumlah PAUD terakreditasi minimal B}}{\text{jumlah PAUD}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah nilai ujian}}{\text{jumlah peserta ujian}} \times 100\%$ $\frac{\text{jumlah nilai ujian}}{\text{jumlah peserta ujian}} \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas Bidang Sekolah Dasar Bidang Sekolah Menengah Pertama

1	2	3	4	5	6
		d. persentase lembaga pendidikan masyarakat minimal B	%	(jumlah lembaga terakreditasi minimal B)/(jumlah lembaga) x 100%	Bidang Paud Dikmas
4.	meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	a. persentase guru yang bersertifikat pendidik b. persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat c. persentase pengawas yang bersertifikat	% % %	(jumlah guru mencapai sertifikasi)/(jumlah guru) x 100% (jumlah kepala sekolah mencapai sertifikasi)/(jumlah kepala sekolah) x 100% (jumlah pengawas mencapai sertifikasi)/(jumlah pengawas) x 100%	Bidang Ketenagaan Bidang Ketenagaan Bidang Ketenagaan
DINAS KESEHATAN					
1.	meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita dan kelompok masyarakat beresiko	a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil b. pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan fasilitas kesehatan c. pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir d. persentase pelayanan kesehatan pada gizi buruk	% % % %	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di bagi jumlah semua ibu hamil (sasaran) x 100 % jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin (sasaran) x 100 % jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten kali 100 % persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100 %	Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
2.	meningkatkan penyehatan lingkungan	jumlah Desa ODF	Desa	jumlah Desa yang ODF dibagi dengan jumlah semua desa x 100 %	Dinkes
3.	meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	UCI	%	jumlah Desa yang tercapai UCI dibagi jumlah semua desa x 100 %	Dinkes

1	2	3	4	5	6
4.	meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Desa siaga aktif	%	persentase dari jumlah Desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk x 100 %	
5.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	a. status Puskesmas TTP menjadi DTP b. status Puskesmas Pembantu menjadi puskesmas	Jumlah Jumlah	jumlah Puskesmas tanpa tempat perawatan yang berubah status menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan jumlah Puskesmas Pembantu yang berubah status menjadi Puskesmas tanpa perawatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
6.	meningkatkan prosentase pelayanan kefarmasian	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	jumlah obat yang terpenuhi dibagi jumlah obat sesuai standar x 100 %	Dinas Kesehatan
7.	meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	nilai IKM di puskesmas dan Dinas Kesehatan	Angka	hasil rekapitulasi <i>quisioner</i> tentang pelayanan publik	Dinas Kesehatan
8.	meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	persentase SDM yang memiliki ijin praktek	%	jumlah SDM yang memiliki izin praktek di bagi dengan jumlah sasaran semua tenaga kesehatan x 100 %	Dinas Kesehatan
9.	meningkatkan jumlah Puskesmas terakreditasi	status Puskesmas terakreditasi: • Dasar 4/5,9% • Madya 5/7,46%	Jumlah	hasil penilaian tim <i>surveyor</i> yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat akreditasi	Dinas Kesehatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	tingkat akuntabilitas		nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
2.	menurunnya angka kelahiran	angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	%	rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan	Bidang Keluarga Berencana
3.	meningkatkan kesejahteraan keluarga	persentase tahapan keluarga Pra KS berbanding jumlah keluarga	%	jumlah keluarga pra sejahtera dibagi jumlah keluarga x 100	Bidang Keluarga Sejahtera
4.	tersedianya data dan informasi kependudukan KB dan PPPA	persentase Kecamatan yang mempunyai data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan PPPA	%	jumlah Kecamatan yang mempunyai data dibagi jumlah seluruh Kecamatan x 100	Bidang Pengendalian Penduduk

1	2	3	4	5	6
5.	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin Poin	mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi.	Bidang Pemberdayaan Perempuan
6.	meningkatkan pemenuhan hak anak	persentase kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	%	jumlah masyarakat yang memberikan bantuan dibagi seluruh jumlah: masyarakat x 100%	Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak
DINAS SOSIAL					
1.	meningkatkan pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	jumlah PMKS yang ditangani mampu melaksanakan peran sosial, memiliki kemandirian ekonomi dalam usaha kesejahteraan sosial	orang	jumlah fakir miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan	Dinas Sosial
2.	meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif menyelenggarakan kesejahteraan sosial	keluarga	jumlah keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah	Bidang Pemberdayaan Sosial
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
1.	meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	persentase penempatan tenaga Kerja yang terdaftar	%	pencari kerja terdaftar dibagi jumlah pengangguran x 100	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	meningkatkan kualitas tenaga kerja	a. persentase tenaga kerja Kompeten b. persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja	% %	jumlah peserta yang lulus dibagi jumlah peserta uji kompetensi x 100 jumlah peserta uji kompetensi dibagi jumlah peserta ikut pelatihan x 100	Bidang Produktifitas Bidang Produktifitas

1	2	3	4	5	6
j.	produksi kubis	ton	jumlah produksi kubis dalam setahun	Dinas Pertanian	
k.	produksi tomat	ton	jumlah produksi tomat dalam setahun	Dinas Pertanian	
l	produksi jahe	ton	jumlah produksi jahe dalam setahun	Dinas Pertanian	
m.	produksi kunyit	ton	jumlah produksi kunyit dalam setahun	Dinas Pertanian	
n.	produksi kapolaga	ton	jumlah produksi kapolaga dalam setahun	Dinas Pertanian	
o.	produksi jeruk	ton	jumlah produksi jeruk dalam setahun	Dinas Pertanian	
p.	produksi pisang	ton	jumlah produksi pisang dalam setahun	Dinas Pertanian	
q.	produksi alpukat	ton	jumlah produksi alpukat dalam setahun	Dinas Pertanian	
r.	produksi stroberi	ton	jumlah produksi stoberi dalam setahun	Dinas Pertanian	
s.	produksi mawar	ton	jumlah produksi mawar dalam setahun	Dinas Pertanian	
t.	produksi sedap malam	ton	jumlah produksi sedap malam dalam setahun	Dinas Pertanian	
u.	produksi krisan	ton	jumlah produksi krisan dalam setahun	Dinas Pertanian	
v.	produksi mahrit	ton	jumlah produksi mahrit dalam setahun	Dinas Pertanian	
w.	produksi hebras	ton	jumlah produksi hebras dalam setahun	Dinas Pertanian	
x.	produksi kopi	ton	jumlah produksi kopi dalam setahun	Dinas Pertanian	
y.	produksi karet	ton	jumlah produksi karet dalam setahun	Dinas Pertanian	
z.	produksi teh	ton	jumlah produksi teh dalam setahun	Dinas Pertanian	
aa.	produksi akarwangi	ton	jumlah produksi akarwangi dalam setahun	Dinas Pertanian	
bb.	produksi tembakau	ton	jumlah produksi tembakau dalam setahun	Dinas Pertanian	
cc.	produksi cengkeh	ton	jumlah produksi cengkeh dalam setahun	Dinas Pertanian	
dd.	produksi nilam	ton	jumlah produksi nilam dalam setahun	Dinas Pertanian	
ee.	produksi lada	ton	jumlah produksi lada dalam setahun	Dinas Pertanian	

1	2	3	4	5	6
		ff. produksi kemiri sunan	ton	jumlah produksi kemiri sunan dalam setahun	Dinas Pertanian
2.	meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian hortikultura dan perkebunan	a. produksi produk olahan hasil hortikultura b. produksi produk olahan hasil hortikultura c. produksi produk olahan hasil perkebunan	ton ton ton	jumlah produk olahan hasil hortikultura dalam setahun jumlah produk olahan hasil hortikultura dalam setahun jumlah produk olahan hasil perkebunan dalam setahun	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
3.	meningkatkan pendapatan keluarga petani hortikultura dan perkebunan	a. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani tanaman pangan per tahun b. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani hortikultura per tahun c. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani perkebunan per tahun d. prosentase penurunan petani miskin	% % % %	mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
DINAS KETAHANAN PANGAN					
1.	meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan, serta tingkat keamanan pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan	Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan. Bidang Keamanan Pangan

1	2	3	4	5	6
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
1.	meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan	a. produksi perikanan budidaya b. produksi perikanan tangkap c. peningkatan pendapatan pada kelompok perikanan budidaya dan nelayan binaan	ton ton %	jumlah produksi hasil perikanan budidaya (kolam dan sawah ikan) dalam satu tahun jumlah produksi perikanan tangkap (laut, sungai, danau/situ) dalam satu tahun peningkatan pendapatan pada kelompok binaan dengan membandingkan rata-rata pendapatan tahun ini dibanding rata-rata pendapatan tahun sebelumnya	Bidang Budidaya Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
2.	meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan	a. produksi daging b. produksi Telur c. produksi Susu d. peningkatan pendapatan pada kelompok peternak binaan	ton ton ribu liter %	jumlah produksi daging dalam satu tahun jumlah produksi telur dalam satu tahun jumlah produksi susu dalam satu tahun peningkatan pendapatan pada kelompok binaan dengan membandingkan rata-rata pendapatan tahun ini dibanding rata-rata pendapatan tahun sebelumnya	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan Bidang Peternakan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
1.	meningkatnya kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisata (juta orang)	orang	jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata dalam satu tahun	Bidang Kepariwisata dan Bidang Pemasaran
2.	meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	persentase seni budaya yang dilestariakan dan dikembangkan	%	jumlah seni budaya yang dilestariakan dan dikembangkan dibagi jumlah seni budaya seluruhnya x 100	Bidang Kebudayaan dan Bidang Kesenian

1	2	3	4	5	6
DINAS KOPERASI DAN UMKM					
1.	meningkatkan kualitas koperasi yang aktif dan sehat	a. prosentase koperasi aktif b. prosentase koperasi sehat	% %	(jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah Koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu (jumlah Koperasi sehat dibagi jumlah Koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM
2.	meningkatkan jumlah pelaku, keterampilan dan pengembangan pasar UMKM	a. jumlah wirausaha baru b. jumlah usaha mikro yang aktif	orang orang	(jumlah wirausaha baru : jumlah Koperasi) x 100% (jumlah usaha mikro aktif : jumlah Koperasi) x 100%	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU					
1.	meningkatkan nilai PMA dan PMDN	a. laju pertumbuhan minat PMA dan PMDN b. laju pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN	% %	(nilai minat PMA dan PMDN tahun dihitung dikurangi nilai minat PMA dan PMDN tahun sebelumnya di bagi nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) x 100% nilai minat PMA dan PMDN tahun dihitung dikurangi nilai minat PMA dan PMDN tahun sebelumnya di bagi nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) x 100%	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Bidang Pengendalian Penanaman Modal
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan	a. persentase kemitatan Jalan Kabupaten b. prosentase jembatan dalam kondisi baik c. persentase saluran drainase/ gorong-gorong jalan Kabupaten dalam kondisi baik	% % %	(panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang : total panjang jalan Kabupaten) x 100% (jumlah jembatan dalam kondisi baik : jumlah total jembatan) x 100% (panjang drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik : panjang total drainase/ gorong-gorong) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6
		d. persentase turap/talud/bronjong jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	(panjang turap/talud/bronjong Kabupaten dalam kondisi baik : total panjang turap/talud/bronjong Kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan	a. persentase tingkat kemantapan jalan desa b. persentase jembatan Desa dalam kondisi baik c. persentase saluran/drainase/gorong-gorong jalan desa dalam kondisi baik d. persentase turap/talud/bronjong jalan desa dalam kondisi baik	% % % %	(luas jalan Desa yang rusak : luas total jalan Desa) x 100% (jumlah jembatan Desa dalam kondisi baik : jumlah total jembatan Desa) x 100% (panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik : panjang drainase/gorong-gorong) x 100% (panjang turap/talud/bronjong jalan kabupaten dalam kondisi baik : total panjang turap/talud/bronjong Kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		e. persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik f. persentase permukiman yang mempunyai sanitasi baik/layak g. persentase KK di perdesaan yang dapat mengakses air bersih	% %	(panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik : total panjang jalan lingkungan) x 100% (jumlah rumah tangga yang mempunyai MCK : jumlah total rumah tangga) x 100% (jumlah KK yang terlayani air bersih : jumlah total KK) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air	a. persentase kemantapan jaringan irigasi teknis b. persentase kemantapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA c. persentase kemantapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA	% % %	panjang saluran irigasi teknis dalam kondisi baik dibagi total panjang saluran irigasi teknis x 100 (panjang saluran irigasi teknis yang baik : total panjang saluran irigasi teknis) x 100% (jumlah situ dalam kondisi baik : jumlah total situ) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6
		d. persentase tingkat kemitatan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA e. persentase tingkat kemitatan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA	% %	(panjang saluran drainase dalam kondisi baik : jumlah total panjang saluran drainase) x 100% (panjang saluran drainase dalam kondisi baik : jumlah total panjang saluran drainase) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	meningkatkan kualitas bangunan gedung	persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi	%	(jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan adm : total bangunan gedung) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	meningkatkan kepatuhan terhadap tata ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	(luas wilayah yang penggunaannya sesuai tata ruang : total luas wilayah yang seharusnya berdasarkan tata ruang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.	meningkatkan kualitas prasarana sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	a. persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik b. persentase drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan (km) dalam kondisi baik c. persentase turap pengaman perumahan dan permukiman dalam kondisi baik d. persentase berkurangnya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/ domestik e. cakupan pelayanan air bersih diperdesaan	% % % % SR	panjang jalan lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun panjang drainase di wilayah perkotaan dan perdesaan yang terbangun panjang turap pengaman perumahan dan permukiman yang terbangun jumlah lokasi sarana dasar yang dibangun jumlah sambungan perumahan air bersih	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman

1	2	3	4	5	6
		f. persentase penerangan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kondisi baik	%	jumlah titik lampu penerangan lingkungan permukiman yang dipasang	Dinas Perumahan dan Permukiman
2.	menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	jumlah rumah tidak layak huni	unit	jumlah rumah di Kabupaten Garut dikurangi jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1.	terjaganya kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. indeks kualitas air	poin	mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan dengan rumus $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Catatan: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		b. indeks kualitas udara	poin	tingkat pelayanan sampah (<i>Level of Service</i>) $= (\text{daya angkut sampah dibagi volume timbunan sampah wilayah pelayanan} \times 100\%)$	Dinas Lingkungan Hidup
2.	meningkatnya pengelolaan sampah	tingkat pelayanan pengelolaan sampah	%	(jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA/jumlah volume timbunan sampah) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup
3.	terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan	indeks vegetasi tutupan lahan	poin	konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan lahan dengan luas wilayah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup
4.	meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau	a. persentase taman/hutan kota dalam kondisi baik	%	(jumlah taman/hutan kota dalam kondisi baik/jumlah taman Kota/hutan kota) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup
		b. persentase Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baik	%	(jumlah TPU yang baik/jumlah TPU) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6
DINAS PERHUBUNGAN					
1.	meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan	a. persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan b. persentase titik kemacetan yang teratasi c. persentase kapal nelayan yang laik layar	% % %	(jumlah kendaraan yang duji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan pada tahun n-1) x 100% jumlah lokasi titik rawan kemacetan yang teratasi pada tahun pengukuran di bagi target lokasi titik rawan kemacetan x 100 (%) jumlah kapal nelayan <7 GT yang laik layar (tersertifikasi) di bagi jumlah seluruh kapal <7GT yang terdata di kali 100%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.	meningkatkan keterbitan dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas	persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	%	jumlah angka pelanggaran lalu lintas pada tahun pengukuran di bagi target x 100	Dinas Perhubungan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1.	meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	persentase kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	%	jumlah wilayah yang memiliki kesiapsiagaan bencana/ jumlah wilayah yang memiliki potensi rawan bencana x 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	meningkatkan penanganan bencana secara cepat dan tepat melalui sistem jaringan yang terintegrasi	persentase penanganan kedaruratan bencana	%	jumlah bencana yang ditangani / jumlah kejadian bencana x 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3.	meningkatkan kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	persentase perbaikan dan pembangunan sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	%	jumlah sarana prasarana fisik dan non fisik yang diperbaiki/ jumlah sarana prasarana fisik dan non fisik yang mengalami kerusakan x 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1	2	3	4	5	6
DINAS PEMADAM KEBAKARAN					
1.	meningkatkan lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang siaga terhadap bahaya kebakaran	cakupan wilayah yang terproteksi bahaya kebakaran	%	luas wilayah yang terproteksi bahaya kebakaran/Luas wilayah Kabupaten Garut x 100%	Dinas Kebakaran Pemadam
2.	meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. persentase kejadian kebakaran yang tertangani b. persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang dapat ditangani	%	jumlah kejadian kebakaran yang di tangani kurang dari 15 menit pada WM/jumlah kebakaran pada WMK x 100%	Dinas Kebakaran Pemadam
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	tercapainya <i>e-government</i> sebagai wujud pelayanan prima	a. jumlah jaringan komunikasi dan informatika antar SKPD b. persentase dampak negatif dari kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi	%	jumlah sistem aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah terintegrasi/jumlah seluruh aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	Bidang Informasi Komunikasi Teknologi dan
2.	terwujudnya pelayanan informasi publik	persentase data statistik komunikasi dan informasi daerah	%	prosentase penyelenggara sistem elektronik instansi pemerintah serta keamanan informasi instansi unit penyelenggara pelayanan publik x 100%	Bidang Informasi Komunikasi Teknologi dan
3.	terwujudnya penyebar luasan informasi melalui multimedia dan media massa;	persentase fasilitas layanan informasi dan dokumentasi publik, penyediaan dan pengolahan informasi, pengelolaan media publik dan kehumasan.	%	jumlah infrastruktur TIK di instansi Pemerintah Kabupaten Garut dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBU) Infokom x 100%	Bidang Informasi Komunikasi Teknologi dan

1	2	3	4	5	6
4.	terwujudnya peran serta masyarakat sebagai mitra penyebaran informasi.	jumlah forum penyampai informasi Pemerintah Kabupaten Garut	%	jumlah forum/komunitas penyebarluasan informasi di 42 Kecamatan x 100%	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
INSPETORAT					
1.	meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut	<div>a. persentase penurunan temuan audit SKPD yang menimbulkan adanya kerugian negara/daerah</div> <div>b. persentase rekomendasi hasil internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti</div> <div>c. persentase tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (DUMAS)</div> <div>d. persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi</div> <div>e. persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP B</div>	%	<div>(jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan yang menimbulkan kerugian negara di bagi jumlah SKPD) dikali 100%</div> <div>(jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi LHP di bagi jumlah SKPD mendapatkan rekomendasi temuan) dikali 100%</div> <div>jumlah DUMAS yang masuk dibagi jumlah DUMAS yang ditindaklanjuti dikali 100%</div> <div>jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Level terdefinisi dibagi Jumlah SKPD yang ada) dikali 100%</div> <div>jumlah SKPD dengan nilai evaluasi SAKIP B dibagi jumlah seluruh SKPD) x 100%</div>	jumlah SKPD yang didapati adanya temuan yang berindikasi adanya kerugian negara/daerah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat SKPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi SKPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B
2.	meningkatkan kompetensi teknis dan kapabilitas APIP dalam pengawasan intern	<div>a. persentase kompetensi APIP untuk setiap jenjang jabatan (Madya, Muda, Pertama)</div> <div>b. level kapabilitas APIP</div>	% Level	jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis substantif dan memperoleh sertifikat keahlian di bagi jumlah APIP dikali 100% hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis substantif hasil penilaian APIP oleh BPKP

1	2	3	4	5	6
BAPPEDA					
1.	terwujudnya perencanaan pembangunan daerah	a. tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $\frac{(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6)}{6}$ $Ki_1 = \frac{\text{keselarasan sasaran}}{\text{jumlah sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}} \times 100\%$ $Ki_2 = \frac{\text{keselarasan indikator sasaran}}{\frac{\text{jumlah indikator sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah indikator sasaran pada RPJMD}}} \times 100\%$ $Ki_3 = \frac{\text{keselarasan target sasaran}}{\frac{\text{jumlah target sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah target sasaran pada RPJMD}}} \times 100\%$ $Ki_4 = \frac{\text{keselarasan program}}{\frac{\text{jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah program pada RPJMD}}} \times 100\%$ $Ki_5 = \frac{\text{keselarasan indikator program}}{\frac{\text{jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah indikator program pada RPJMD}}} \times 100\%$ $Ki_6 = \frac{\text{keselarasan target program}}{\frac{\text{jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah target program pada RPJMD}}} \times 100\%$	Bappeda

1	2	3	4	5	6
		b. tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD		tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD = $(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6) / 6$	
				$Ki_1 = \frac{\text{keselarasan sasaran}}{\frac{\text{jumlah sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah sasaran pada RPJMD}}} \times 100\%$	
				$Ki_2 = \frac{\text{keselarasan indikator sasaran}}{\frac{\text{jumlah indikator sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah indikator sasaran pada RPJMD}}} \times 100\%$	
				$Ki_3 = \frac{\text{keselarasan target sasaran}}{\frac{\text{jumlah target sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah target sasaran pada RPJMD}}} \times 100\%$	
				$Ki_4 = \frac{\text{Keselarasan Program}}{\frac{\text{jumlah program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah program pada RPJMD}}} \times 100\%$	
				$Ki_5 = \frac{\text{Keselarasan Indikator Program}}{\frac{\text{jumlah indikator program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah indikator program pada RPJMD}}} \times 100\%$	
				$Ki_6 = \frac{\text{keselarasan target program}}{\frac{\text{jumlah target program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{jumlah target program pada RPJMD}}} \times 100\%$	

1	2	3	4	5	6
		c. tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD		tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD = $\frac{(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6)}{6}$	Bappeda
				$Ki_1 = \frac{\text{keselarasan program} - \frac{\text{jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{jumlah program pada RKPD}}}{\text{keselarasan program}} \times 100\%$	
				$Ki_2 = \frac{\text{keselarasan indikator program} - \frac{\text{jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{jumlah indikator program pada RKPD}}}{\text{keselarasan indikator program}} \times 100\%$	
				$Ki_3 = \frac{\text{keselarasan target program} - \frac{\text{jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan Renja}}{\text{jumlah target program pada RPJMD}}}{\text{keselarasan target program}} \times 100\%$	
				$Ki_4 = \frac{\text{keselarasan kegiatan} - \frac{\text{jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{jumlah kegiatan pada RKPD}}}{\text{keselarasan kegiatan}} \times 100\%$	
				$Ki_5 = \frac{\text{keselarasan indikator kegiatan} - \frac{\text{jumlah indikator kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{jumlah indikator kegiatan pada RKPD}}}{\text{keselarasan indikator kegiatan}} \times 100\%$	
				$Ki_6 = \frac{\text{Keselarasan Target Kegiatan} - \frac{\text{jumlah target kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{jumlah target kegiatan pada RKPD}}}{\text{Keselarasan Target Kegiatan}} \times 100\%$	

1	2	3	4	5	6
		d. persentase perbandingan usulan aspiratif dan teknokratif yang telah masuk dalam dokumen perencanaan SKPD	%	(jumlah usulan aspiratif dan teknokratif yang ada dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah total usulan aspiratif dan teknokratif) x 100%	Bappeda
2.	meningkatkan pemanfaatan data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	a. persentase hasil kajian dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan b. persentase integrasi data capaian kinerja dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	% %	(jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/disepakati untuk dilaksanakan dibagi jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah disusun) x 100% (jumlah data kinerja yang terisi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah dibagi jumlah data kinerja yang harus diisi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah) x 100%	Bappeda Bappeda
3.	meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah	a. persentase pencapaian kinerja RPJMD b. persentase capaian kinerja program pembangunan	% %	(indikator dalam RPJMD yang mencapai/melebihi target dibagi jumlah total indikator dalam RPJMD) x 100% (jumlah program yang dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program yang direncanakan dalam RKPD) x 100%	Bappeda Bappeda
4.	meningkatkan akuntabilitas Bappeda	a. nilai evaluasi SAKIP Kabupaten b. nilai evaluasi SAKIP Bappeda c. persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	angka angka %	sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan) x 100%	Bappeda Bappeda Bappeda

1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT DAERAH					
1.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	nilai LPPD	nilai	nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan indeks komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase Kecamatan berkinerja baik	%	(jumlah Kecamatan berkinerja baik dibagi dengan jumlah Kecamatan yang ada di kabupaten Garut) x 100%	Bagian Pemerintahan Tata
3.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase kasus pertanahan yang difasilitasi	%	(jumlah kasus pertanahan yang terinventarisir pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani) x 100%	Bagian Pemerintahan Tata
4.	terpenuhinya kebutuhan publik daerah, publikasi produk hukum dan penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	(jumlah produk hukum yang ditetapkan di bagi dengan produk hukum yang diusulkan) x 100%	Bagian Hukum dan HAM
5.	meningkatnya kualitas pelayanan publik	persentase SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan	%	(jumlah SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan dibagi jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Garut) x 100%	Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT DAERAH					
1.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	nilai LPPD	nilai	nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan indeks komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase Kecamatan berkinerja baik	%	(jumlah Kecamatan berkinerja baik dibagi dengan jumlah Kecamatan yang ada di kabupaten Garut) x 100%	Bagian Pemerintahan Tata
3.	meningkatnya tata kelola/sistem penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase kasus pertanahan yang difasilitasi	%	(jumlah kasus pertanahan yang terinventarisir pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani) x 100%	Bagian Pemerintahan Tata
4.	terpenuhinya kebutuhan publik daerah, publikasi produk hukum dan penanganan permasalahan dalam hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	(jumlah produk hukum yang ditetapkan di bagi dengan produk hukum yang diusulkan) x 100%	Bagian Hukum dan HAM
5.	meningkatnya kualitas pelayanan publik	persentase SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan	%	(jumlah SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan dibagi jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Garut) x 100%	Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6
6.	meningkatkan Kualitas administrasi pembangunan	persentase paket pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP	%	(jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP dibagi dengan jumlah paket yang ada dalam SiRUP) x 100%	Bagian Administrasi Pembangunan/ULP
SEKRETARIAT DEWAN					
1.	meningkatkan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Garut terhadap pelayanan sekretariat DPRD dibanding jumlah Anggota DPRD	%	(jumlah dewan yang puas : jumlah anggota DPRD) x 100%	Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Penyelenggaraan administrasi keuangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1.	meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah	a. persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	(jumlah SKPD dengan penyelesaian perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 %	Bidang Anggaran
		b. persentase SKPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%	%	(jumlah SKPD dengan realisasi >90% dibanding SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 %	Bidang Perbendaharaan
2.	meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah	a. persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset sesuai standar (SAP) dan tepat waktu	%	(jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai standar (SAP) dan tepat waktu dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		b. persentase aset daerah yang terinventarisir	%	(jumlah rincian total BMD di Simda barang dibagi data aset pada neraca Pemerintah Kabupaten di Simda Keuangan (SIPKD)) x 100%	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1	2	3	4	5	6
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	meningkatnya Asli Daerah (PAD) memenuhi pembangunan daerah	Pendapatan dalam pembangunan	persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	jumlah wajib pajak daerah lama x 100 % jumlah wajib pajak daerah baru/wajib pajak daerah x 100 % persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah jumlah pendapatan daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT					
1.	meningkatnya Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan	kompetensi	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan	%	(jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan) x 100% Badan Kepegawaian dan Diklat
2.	meningkatnya pelayanan kepegawaian	kualitas administrasi	persentase meningkatnya PNS yang terpenuhi pemberhentian dan tugas	%	jumlah PNS yang terpenuhi pemberhentian dan tugas/jumlah seluruh PNS x 100% Badan Kepegawaian dan Diklat
3.	meningkatnya kinerja pegawai		persentase meningkatnya sumber daya aparatur berdasarkan kinerja	%	jumlah SDA berdasarkan kinerja/jumlah seluruh SDA x 100% Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KETAHANAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	meningkatnya terjadinya konflik	antisipasi	persentase penurunan kejadian terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat	%	jumlah penurunan kejadian terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat) x 100% Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
2.	meningkatnya kesadaran berdemokrasi	kesadaran	persentase kesadaran politik masyarakat	%	(jumlah kesadaran politik masyarakat x 100% Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
3.	meningkatnya kewilayahan di masyarakat	kondusifitas	tingkat penyelesaian konflik	%	(jumlah tingkat penyelesaian konflik x 100% Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
4.	meningkatnya masyarakat pemantapan kebangsaan	peranserta dalam wawasan	persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	(jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif) x 100% Badan Ketahanan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	meningkatkan peran penyelenggaraan pemerintahan Desa	persentase Desa berkinerja baik	%	jumlah Desa berkinerja baik sekarang dikurangi jumlah Desa berkinerja baik tahun lalu dibagi keseluruhan jumlah Desa seKabupaten Garut x 100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	meningkatkan peran masyarakat pelaksanaan pembangunan Desa	a. persentase kontribusi murni masyarakat dalam membangun kewilayahan b. prosentase LPM Desa yang aktif c. prosentase kader posyandu aktif	% % %	jumlah swadaya murni masyarakat yang tertera di APBDes tahun sekarang di kurang jumlah swadaya murni masyarakat tahun lalu dibagi jumlah keseluruhan Desa x 100 % jumlah LPM yang aktif pada tahun sekarang dikurangi jumlah LPM yang aktif pada tahun lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan desa x 100% jumlah kader Posyandu tahun sekarang dikurangi jumlah kader Posyandu tahun lalu dibagi jumlah keseluruhan Desa x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	meningkatkan kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan	a. persentase kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang aktif b. prosentase Desa memiliki BUMDes c. prosentase pasar Desa terfasilitasi	% % %	jumlah kelompok usaha ekonomi yang ada di Desa pada tahun ini dikurangi dengan jumlah usaha ekonomi masyarakat pada tahun lalu dibagi jumlah keseluruhan Desa x 100% jumlah BUMDes pada tahun ini dikurangi jumlah BUMDes tahun lalu dibagi jumlah keseluruhan desa x 100% jumlah pasar Desa yang baik dan aktif dibagi jumlah keseluruhan pasar Desa x 100 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT					
1.	meningkatnya minat baca masyarakat	prosentase pemustaka, koleksi dan akses layanan pertahun	%	prosentase pemustaka + prosentase koleksi + prosentase akses layanan : 3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	meningkatnya arsip di lingkungan pemerintah daerah	prosentase SKPD yang telah menerapkan aturan arsip secara baku	%	jumlah SKPD yang menerapkan Arsip Secara Baku (dibina) : Jumlah SKPD x 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
1.	meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	a. persentase penerbitan kartu keluarga b. persentase penduduk usia > 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP c. cakupan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran d. cakupan pelayanan penerbitan Akta Kematian e. persentase validitas data kependudukan dan catatan sipil f. persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD	% % % % % %	jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga x 100% jumlah KTP-el yang diterbitkan dibagi jumlah Permohonan Penerbitan KTP x 100% jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran x 100% jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan akta kematian x 100% jumlah data kependudukan dan catatan sipil valid dibagi seluruh data kependudukan x 100% jumlah data yang dimanfaatkan SKPD dibagi seluruh data kependudukan x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan

1	2	3	4	5	6
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1.	menurunnya pelanggaran Peratura Daerah terhadap produk hukum daerah	persentase penurunan pelanggaran terhadap produk hukum daerah	%	jumlah penanganan pelanggaran Daerah/jumlah pelanggaran Daerah yang dilaporkan x 100%	Satpol PP
2.	meningkatnya perlindungan ketentraman dan kenyamanan masyarakat	a. persentase Linmas yang aktif dan terlatih b. persentase fasilitas publik di zona merah berfungsi sesuai peruntukannya c. persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	jumlah Linmas yang aktif dan terlatih/jumlah Linmas di Kabupaten Garut x 100% jumlah zona merah yang sudah diterbitkan/jumlah zona merah x 100% jumlah pelanggaran yang ditangani/jumlah pelanggaran x 100%	Satpol PP Satpol PP Satpol PP
KECAMATAN GARUT KOTA					
1.	meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Garut Kota
2.	meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah/Desa/Kelurahan	a. persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti b. persentase kemasyarakatan yang berkriteria baik	%	(persentasi pelayanan yang dilayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang belum dibayar) x 100% perbandingan antar jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Garut Kota x 100 %	Kec. Garut Kota Kec. Garut Kota

1	2	3	4	5	6
KECAMATAN TAROGONG KIDUL					
1.	meningkatnya pelayanan publik	kualitas	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (ikm)	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Tarogong Kidul
2.	meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	kualitas	a. persentase Desa/Kelurahan yang berkinerja baik	jumlah Desa/Kelurahan yang berkinerja baik dibagi jumlah Desa/Kelurahan x 100%	Kec. Tarogong Kidul

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN